
Kontribusi Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia

Hidayat Chusnul Chotimah

Universitas Teknologi Yogyakarta

hidayat.chotimah@uty.ac.id

Muhammad Ridha Iswardhana

Universitas Teknologi Yogyakarta

muhammad.ridha@staff.uty.ac.id

Submitted: 19 May 2026 Revision: 11 August 2026 Accepted: 18 August 2026

Abstrak

Bantuan internasional selama ini didominasi oleh peran negara maju sebagai donor ke negara berkembang. Penelitian ini menggunakan perspektif negara berkembang yang dapat memberikan bantuan luar negeri kepada sesama negara berkembang lainnya untuk mengkaji bagaimana bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional negara donor. Dengan menggunakan kerangka liberalisme institusional Keohane dan Nye serta empat mekanisme kausal Martínez-Zarzoso yaitu door-opening policy, trade-cost reduction, goodwill and long-term relationship, dan FTA promotion, penelitian ini menganalisis bagaimana bantuan luar negeri Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menciptakan interdependensi positif antara negara donor dan penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan berupa hibah, pelatihan teknis, investasi, dan kerja sama produksi berfungsi sebagai instrumen strategis yang membuka akses pasar non-tradisional, meningkatkan ekspor, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui empat dimensi yaitu perdagangan, investasi, ketahanan terhadap guncangan, dan kapasitas adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa bantuan luar negeri dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan bersifat saling menguntungkan dan bukan zero-sum game.

Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Indonesia, Kawasan Afrika, Ketahanan Ekonomi

Abstract

International aid has traditionally been dominated by developed nations acting as donors to developing countries. This study adopts the perspective of a developing nation providing foreign aid to other developing countries to examine how Indonesia's foreign aid in Africa contributes to the donor nation's national economic resilience. Utilizing Keohane and Nye's institutional liberalism framework and Martínez-Zarzoso's four causal mechanisms such as door-opening policy, trade-cost reduction, goodwill and long-term relationships, and FTA promotion, the research analyzes how Indonesia's foreign aid, channeled through the Indonesian Agency for International Development Cooperation (LDKPI) and South-South and Triangular Cooperation (SSTC), fosters positive interdependence between donor and recipient nations. The results indicate that aid in the form of grants, technical training, investment, and production cooperation serves as a strategic instrument that opens access to non-traditional markets, boosts exports, and strengthens Indonesia's economic resilience across four dimensions namely trade, investment, resilience to shocks, and adaptive capacity. These findings confirm that foreign aid within the framework of South-South Cooperation is mutually beneficial rather than a zero-sum game.

Keyword: Foreign Aid, Indonesia, African Region, Economic Resilience

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, bidang ekonomi merupakan salah satu penggerak dari hubungan kerja sama antar negara. Dalam hal ini, globalisasi ekonomi telah mengikat urusan-urusan domestik dengan urusan-urusan internasional seperti yang menyangkut masalah perdagangan internasional maupun arus keuangan internasional. Terlebih, dapat dilihat bahwa pada awal abad ke-20, banyak sekali negara-negara di dunia yang mulai

membuka diri dan mengintegrasikan perekonomiannya dengan pasar internasional (Hamonangan, 2020). Globalisasi ekonomi dapat memberikan peluang positif bagi negara Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama pembangunan internasional dengan negara berkembang lainnya atau Global South, termasuk melalui pemberian bantuan luar negeri.

Semenjak Indonesia memprakarsai terbentuknya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, pemerintah Indonesia mulai aktif bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya untuk memajukan pembangunan global. Forum-forum internasional yang berfokus pada program pembangunan ekonomi pun mulai diselenggarakan seperti *Conference on Technical Cooperation Among Developing Countries* yang dihadiri oleh 138 negara dengan *output* berupa *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA). Kedua konferensi tersebut merupakan tonggak dan katalisator bagi terbentuknya *South–South Cooperation* (SSC) atau Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) (IsDB, 2020).

KSS merupakan platform yang digunakan untuk bertukar pengalaman dan mendorong strategi pembangunan yang inovatif mengingat laju pembangunan di antara negara-negara tersebut tidak merata. Yang paling penting, kerja sama ekonomi dan keuangan antar negara berkembang dalam berbagai bentuk telah memberi alternatif dan peluang dalam meningkatkan perdagangan, investasi asing langsung (FDI), sumber daya keuangan, transfer teknologi, dan bentuk lainnya. Mengingat kedekatan antar negara berkembang tersebut, dalam tahap perkembangan ekonomi dan latar belakang yang sama, efektivitas biaya dari kerja sama ini pada

akhirnya memberikan keuntungan tambahan (IsDB & South Centre, 2019).

Program-Program KSS dikelola oleh Pemerintah Indonesia di bawah beberapa Kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Keuangan serta melibatkan beberapa institusi lain yang berperan sebagai pelaksana. Untuk melakukan koordinasi dalam pengelolaan KSS, keempat kementerian tersebut masuk dalam bagian Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (Tim Kornas KSST). Tim tersebut bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pengelolaan program KSS antara negara berkembang ataupun dengan melalui keterlibatan dari negara maju sebagai skema kerja sama triangular. Jika melihat tujuannya, pembentukan awal KSS lebih ditujukan untuk menggalang solidaritas di antara negara berkembang yang memberikan *mutual benefit*. KSS kemudian lebih berorientasi pada kerja sama ekonomi dan pembangunan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan menciptakan daya saing di negara-negara Selatan (Pusat P2K-OI, 2016).

Indonesia mengambil peran dalam KSS untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemandirian bersama yang saling menguntungkan. Semenjak tahun 2010 hingga 2020, Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengidentifikasi lebih dari 400 program KSS dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 6.500 orang (Hutabarat, 2022). Saat ini telah terjadi pergeseran sumber aliran investasi yang sebelumnya berpusat di Global North kemudian beralih oleh aliran investasi yang berpusat di Global South (Pusat P2K-OI, 2016). Dalam hal ini, Kawasan Global South yang merupakan negara-negara berkembang, telah mencapai tingkat aliran investasi tertinggi sebesar US\$759 miliar sejak 2013, serta menyumbang 52% dari arus masuk FDI global. Aktivitas perdagangan antara negara Selatan-Selatan juga mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan antara negara Utara-Selatan (hanya meningkat sebesar enam kali lipat) dari tahun 1980-2008 (Nauli, 2021).

Di bawah kerangka KSST, Indonesia telah menyalurkan dana bantuan ke beberapa negara berkembang. Bantuan tersebut bersumber dari APBN maupun non-APBN dengan beragam skema. Beberapa skema tersebut seperti skema kerja sama multilateral (contohnya *Reverse Linkage IDB*), bilateral, triangular, dana perwalian (contohnya *South-South Facility* dengan

World Bank), perbankan, BUMN, Swasta, serta lembaga nirlaba sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Bappenas, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis berargumen bahwa bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika di bawah kerangka KSS dan KSST bukan semata-mata tindakan solidaritas, melainkan merupakan instrumen strategis yang secara terukur berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional negara donor. Kontribusi ini beroperasi melalui empat mekanisme kausal yang diidentifikasi oleh Martínez-Zarzoso (2019) yaitu *door-opening policy*, *trade-cost reduction*, *goodwill and long-term relationship*, dan *FTA promotion* yang juga merupakan bagian dalam kerangka liberal Keohane dan Nye (1977) untuk menciptakan kondisi *positive interdependence* antara negara donor dan penerima.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini didominasi oleh perspektif negara maju sebagai donor, dengan menawarkan kerangka analitis *donor-centric* dari negara berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori bantuan luar negeri dan konsep ketahanan ekonomi sebagai alat analisis.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Bantuan Luar Negeri

Studi tentang bantuan luar negeri dalam hubungan internasional tidak berpijak pada satu teori tunggal, melainkan pada rangkaian perspektif yang saling bersaing sejak awal Perang Dingin (Malacalza, 2019). Realisme dan neo-realisme memandang bantuan sebagai instrumen kekuasaan negara dalam sistem internasional yang anarkis. Morgenthau (1962), sebagai peletak dasar realisme klasik, merumuskan enam jenis bantuan luar negeri yaitu *humanitarian*, *subsistence*, *military*, *bribery*, *prestige*, dan *economic development*. Morgenthau (1962) berargumen bahwa sebagian besar praktik bantuan sesungguhnya berfungsi sebagai “suap” atau “*bribery*” yang dibungkus retorika pembangunan ekonomi, tanpa bukti korelasi nyata terhadap pembangunan, stabilitas sosial, atau demokrasi di negara penerima. Dari perspektif lain seperti konstruktivisme menekankan dimensi moral, norma, dan identitas, di mana bantuan dipahami sebagai ekspresi keyakinan tentang keadilan sosial dan solidaritas internasional yang terbentuk secara intersubjektif (Malacalza, 2019). Sementara itu, tradisi ekonomi politik internasional dan pendekatan strukturalis - kritis mempertanyakan bagaimana bantuan mereproduksi hierarki dan ketergantungan antara negara industri dan negara bekas jajahannya (Baydag, 2026; Malacalza, 2019). Baydag (2026) menambahkan bahwa

perdebatan ini pada dasarnya masih terjebak dalam dikotomi lama antara *self-interest* negara donor dan altruisme.

Di antara berbagai perspektif tersebut, penelitian ini secara tegas mengadopsi pendekatan liberalisme dan institusionalisme yang dibangun dari gagasan Keohane dan Nye (1977) tentang interdependensi kompleks (*complex interdependence*). Dalam kerangka ini, bantuan luar negeri dipahami bukan sebagai instrumen dominasi satu negara atas negara lain, melainkan sebagai hasil kebutuhan negara-negara untuk mengkoordinasi kebijakan dan mengatasi tantangan bersama melalui rezim dan institusi internasional, sehingga kerja sama dipandang saling menguntungkan dan bukan semata kompetisi kekuasaan (Malacalza, 2019). Lebih lanjut, pendekatan ini mengarah pada konsep *positive interdependence*, yakni kondisi di mana ketergantungan timbal-balik antar negara justru menjadi sumber keuntungan bersama. Dalam hal ini, negara donor memperoleh akses pasar, penguatan hubungan bilateral, dan diversifikasi ekonomi, sementara negara penerima memperoleh transfer kapasitas, teknologi, dan dukungan pembangunan. Dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan yang dijalankan Indonesia di Kawasan Afrika, kerangka liberal ini relevan karena bantuan yang diberikan tidak bersifat hierarkis atau koersif sebagaimana dikritik

oleh tradisi dependensi, melainkan dibangun di atas prinsip kesetaraan, *mutual benefit*, dan penguatan kapasitas bersama (IsDB & South Centre, 2019; Nauli, 2021). Unsur saling percaya dan kapasitas kelembagaan yang profesional menjadi prasyarat agar interdependensi positif tersebut terwujud sehingga kedua belah pihak memperoleh hasil sesuai tujuan yang ingin dicapai (Siregar, 2016).

Dalam perkembangannya, bantuan luar negeri dapat berwujud pinjaman, bantuan medis, bantuan teknis, komoditi impor, maupun hibah, yang secara sektoral mencakup infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, serta sektor produksi (Thérien, 2002; Yiew & Lau, 2018). Mengenai dampaknya, Yiew dan Lau (2018) serta Nchofoung et al. (2022) berpendapat bahwa bantuan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan barang dan sumber daya antarnegara.

Martínez-Zarzoso (2019) mengidentifikasi empat mekanisme kausal melalui mana bantuan mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi negara donor. Pertama, bantuan berfungsi sebagai *door-opening policy* yang membangun hubungan resmi dan menjadikan donor sebagai mitra dagang terpercaya. Kedua, bantuan infrastruktur dan fasilitasi perdagangan menurunkan biaya

transaksi sehingga meningkatkan volume ekspor. Ketiga, hubungan bantuan jangka panjang menumbuhkan *goodwill* yang memberi insentif bagi negara penerima untuk membeli produk donor. Keempat, hubungan bilateral yang terbangun menjadi fondasi bagi pembentukan *Free Trade Area* (FTA) yang mengurangi hambatan tarif dan non-tarif.

Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka liberal Keohane dan Nye, bantuan luar negeri bukan *zero-sum game* melainkan menciptakan interdependensi positif yang memperkuat ketahanan ekonomi kedua belah pihak di mana negara penerima melalui pembangunan kapasitas, dan negara donor melalui diversifikasi pasar serta penguatan posisi dalam perdagangan internasional.

Konsep Ketahanan Ekonomi

Konsep ketahanan ekonomi berkaitan dengan kondisi dinamis perekonomian suatu negara yang berupa ketangguhan dan kegigihan yang mencakup kemampuan suatu negara dalam mengatasi berbagai ancaman maupun tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna menjaga perekonomian negara tetap stabil dan dapat bertahan di tengah risiko - risiko yang dihadapi (Wulandari, 2017).

Konsep ketahanan ekonomi (*economic resilience*) berkembang dari, dan sering tumpang tindih dengan, konsep keamanan ekonomi (*economic security*) dalam kajian keamanan dan ekonomi politik internasional (IPE). Buzan (1991) mendefinisikan keamanan ekonomi sebagai akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang dapat diterima. Definisi ini menekankan dimensi akses dan ketergantungan eksternal yang mana sebuah negara dikatakan aman/tangguh secara ekonomi bukan karena tertutup dari dunia luar, melainkan karena memiliki akses yang stabil dan terdiversifikasi terhadap pasar dan sumber daya global.

Dengan merujuk pada definisi Buzan tentang akses pasar dan sumber daya sebagai inti ketahanan/keamanan ekonomi, serta pada logika liberal-institusionalis mengenai bantuan sebagai *door-opening policy* dan *trade-cost reduction* (Martínez-Zarzoso, 2019) yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel ini mengonseptualisasikan ketahanan ekonomi negara donor sebagai kapasitas suatu negara untuk memperluas dan mendiversifikasi akses pasar serta sumber dayanya melalui instrumen kerja sama dan bantuan luar negeri, sehingga mengurangi

kerentanannya terhadap guncangan ekonomi di pasar tradisional.

Konsep ini mencakup beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi perdagangan tercermin dari kerentanan perekonomian terhadap guncangan permintaan eksternal, seperti penurunan permintaan ekspor, yang berdampak langsung pada *output* domestik (Agnani et al., 2024). Kedua, dimensi investasi terlihat dari sensitivitas perekonomian terhadap perubahan arus investasi sebagai salah satu komponen permintaan akhir yang memengaruhi stabilitas produksi sektoral. Ketiga, dimensi ketahanan terhadap guncangan (*shock resistance*) merujuk pada kemampuan intrinsik sistem ekonomi untuk meredam dampak negatif guncangan melalui realokasi sumber daya tanpa perlu merestrukturisasi aktivitas ekonomi secara fundamental, yang oleh Rose (2004, 2007, dalam Agnani et al., 2024) disebut sebagai *static resilience*. Keempat, dimensi kapasitas adaptif mencakup kemampuan sistem untuk melakukan penyesuaian struktural, pembelajaran, dan transformasi jangka panjang, yang menurut kerangka OECD (2014, dalam Agnani et al., 2024) terbagi menjadi kapasitas absortif, adaptif, dan transformatif sebagai respons terhadap tekanan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktif Indonesia sebagai Negara Donor dalam Kerja sama Pembangunan Internasional di Kawasan Afrika

Selama ini dalam lingkup kerja sama internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang mendapatkan bantuan luar negeri dari negara lain, baik dalam bentuk utang/pinjaman luar negeri maupun *grant*/hibah. Hal ini berkaitan dengan status yang disandang Indonesia sebagai negara berkembang yang berada pada level negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower-middle-income country*) (Pribadi, 2021).

Pada awalnya, bantuan luar negeri diperkenalkan oleh negara-negara maju untuk menangani masalah perekonomian yang runtuh akibat Perang Dunia 1 dan 2. Negara maju mendominasi pola pemberian bantuan internasional ke negara berkembang sebagai bentuk *Northern-led growth*. Pola ini kemudian mengalami pergeseran dalam dua dekade terakhir di mana negara-negara berkembang juga ikut berperan aktif dalam berbagai fora kerja sama internasional yang kemudian dikenal istilah *multipolar-growth* (Sofjan et al., 2014).

Dalam hal ini, Indonesia telah beradaptasi pada tingkat regional maupun global untuk mengambil peran tersebut

sehingga saat ini Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara *beneficiary* tetapi juga sebagai negara donor dalam bantuan internasional. Terlebih status Indonesia juga telah mengalami peningkatan menjadi negara *upper-middle-income country* pada pertengahan 2020 (Pribadi, 2021).

Transformasi ini, dalam perspektif liberalisme institusional Keohane dan Nye (1977), mencerminkan pergeseran dari hubungan asimetris yang berbasis dependensi menuju hubungan interdependensi yang lebih seimbang, di mana negara-negara Selatan tidak lagi semata menjadi objek bantuan melainkan subjek aktif yang turut membentuk arsitektur kerja sama internasional.

Dalam upaya meningkatkan peran Indonesia di tingkat global, Indonesia berusaha untuk meningkatkan peranan dan sumbangsih melalui kerangka KSS dan KSST. Peningkatan penerapan KSST dianggap sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional. Indonesia juga telah berubah dari negara penerima bantuan luar dari negara utara menjadi negara yang memberikan bantuan kepada negara selatan melalui KSST (BPPK Kemenlu, 2015).

KSST Indonesia juga dapat menjadi *benchmark* dan contoh bagi negara selatan lain yang juga menjalankan KSST (Brazil,

Rusia, Tiongkok, Turki, Meksiko, Afrika Selatan, dan India). Relasi *power* Indonesia dan negara penerima KSST memiliki hal positif ketika ilmu pengetahuan, bantuan, dan investasi asal Indonesia bermanfaat bagi berbagai negara penerima KSST sebagai bentuk solidaritas sesama negara berkembang yang saling menguntungkan.

Dalam kerangka *complex interdependence* Keohane dan Nye (1977), pergeseran ini menandai berkurangnya relevansi kekuatan koersif (*military force*) sebagai instrumen utama hubungan internasional dan meningkatnya peran saluran-saluran multilateral serta transnasional, termasuk kerja sama teknis, pelatihan, dan investasi sebagai media interaksi antarnegara. KSST dengan demikian bukan sekadar forum solidaritas, melainkan manifestasi dari kebutuhan negara-negara berkembang untuk mengkoordinasi kebijakan pembangunan secara kolektif di luar kerangka hierarkis Utara-Selatan.

KSST mengalami perkembangan signifikan yang melibatkan pengusaha dan akademisi. Aktor non-negara diberikan peluang yang lebih besar untuk mendukung "Diplomasi Tangan Di atas" Indonesia melalui investasi dan pelatihan. Pada saat

Indonesia telah berkontribusi dalam program KSS dan KSST baik sebagai

bersamaan Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang lebih besar berupa anggaran, jumlah kegiatan pelatihan, dan pembentukan *single agency*. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan fokus Pemerintah Indonesia ke arah diplomasi ekonomi. Pada saat bersamaan perusahaan dan akademisi mengalami peningkatan sumbangsih sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan KSST tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan perusahaan pemerintah, swasta, dan akademisi (Tim Kornas KSST, 2017).

Pelibatan aktor non-negara ini sejalan dengan salah satu proposisi utama Keohane dan Nye (1977) bahwa dalam kondisi interdependensi kompleks, batas antara politik domestik dan internasional menjadi kabur, dan aktor-aktor non-negara termasuk perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi saluran penting dalam membentuk hubungan antarnegara. Dengan demikian, KSST Indonesia tidak lagi beroperasi semata sebagai instrumen *state-to-state*, melainkan sebagai jejaring multi-aktor yang memperluas basis *positive interdependence* antara Indonesia dan negara-negara mitra di Kawasan Afrika.

negara penerima bantuan maupun negara pemberi bantuan luar negeri (negara donor).

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2016 tentang Perubahan PMK 92/2014 tentang pemberian bantuan kepada lembaga asing, Indonesia telah menyalurkan bantuan luar negerinya kepada 16 penerima selama rentang tahun 2014-2018 dan meningkat menjadi 23 penerima di tahun 2019. Bantuan tersebut terdiri dari hibah untuk kemanusiaan, penanggulangan bencana, maupun pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas umum (Pribadi, 2021).

Pemberian bantuan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama tahun 2014-2018 lebih memfokuskan pada kawasan Asia, Pasifik dan Afrika dengan masing-masing sebesar Rp.55,37 miliar, Rp.48,11 miliar, dan Rp.58,75 miliar. Sementara untuk kawasan Amerika dan Australia sebesar Rp.43,27 miliar (Kurniadi, 2020). Khusus untuk pemberian bantuan luar negeri ke Kawasan Afrika selama periode 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Negara Penerima Bantuan Luar Negeri dari Indonesia di Kawasan Afrika

No.	Negara Penerima Hibah	Tahun	Jumlah Dana
1.	Madagaskar	2021	2,23 Miliar
2.	Mozambik	2021	2,16 Miliar
3.	Zimbabwe	2021	2,1 Miliar
4.	Senegal	2022	3,2 Miliar
5.	Gambia	2023	1,62 Miliar
6.	Nigeria	2023	30,3 Miliar
7.	Ethiopia	2023	2,15 Miliar

Sumber: Diolah dan diadaptasi dari LDKPI, 2023

Pemberian bantuan luar negeri sebagai bagian dalam kerangka kerja sama

pembangunan internasional memberikan manfaat tidak hanya bagi negara penerima

donor tetapi juga bagi Indonesia selaku negara donor yaitu untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2019, untuk mengimplementasikan penyaluran hibah, Indonesia membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Aid* (INDOAID). Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2019 sebagai payung hukum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Aid* sebagai Badan Layanan Umum (LDKPI, tanpa tahun).

Dalam perspektif liberalisme institusional, pembentukan LDKPI merupakan langkah krusial karena, sebagaimana ditegaskan Keohane dan Nye (1977), institusi berfungsi sebagai mekanisme yang mengurangi ketidakpastian (*uncertainty reduction*), menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*), dan menyediakan kerangka aturan yang memungkinkan kerja sama berulang (*iterated cooperation*) antarnegara. LDKPI, dengan pengelolaan *endowment fund* dan mekanisme penyaluran hibah yang terstruktur, menjalankan fungsi institusional tersebut dengan menjadikan komitmen bantuan Indonesia kredibel, dapat diprediksi, dan berkelanjutan, sehingga membangun fondasi kepercayaan (*trust*) yang diperlukan bagi terciptanya *positive interdependence*

dengan negara-negara penerima di Kawasan Afrika.

Bantuan luar negeri yang telah diberikan Indonesia jika dilihat dari tahun 2014-2019 semakin mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 pengeluaran hibah mengalami puncak tertinggi yaitu 234,2 Miliar rupiah (LDKPI, tanpa tahun). Sementara pasca LDKPI berdiri tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam hal anggaran dari awalnya Rp 1 Triliun (2018), Rp 2 Triliun (2019), dan Rp 4 Triliun (2020-2021) (Saptoaji Prabowo, 2020).

Peningkatan anggaran yang konsisten ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri Indonesia bukan bersifat *ad hoc* atau reaktif semata, melainkan telah menjadi kebijakan yang terlembagakan (*institutionalized*). Dalam logika Keohane dan Nye (1977), pelembagaan kerja sama semacam ini penting karena menciptakan ekspektasi stabil di antara para aktor, mendorong kepatuhan terhadap komitmen bersama, dan membuka ruang bagi eskalasi kerja sama dari level teknis ke level ekonomi yang lebih luas.

Hubungan antara Bantuan Luar Negeri terhadap Peningkatan Ekspor

Hubungan kausal antara bantuan luar negeri dan peningkatan ekspor negara donor

dapat dipahami melalui empat mekanisme yang diidentifikasi oleh Martínez-Zarzoso (2019), yaitu *door-opening policy*, *trade-cost reduction*, *goodwill* and *long-term relationship*, dan *FTA promotion*. Dalam kerangka liberalisme institusional Keohane dan Nye (1977), keempat mekanisme ini merupakan manifestasi dari *complex interdependence*, di mana interaksi antarnegara tidak lagi didominasi oleh kekuatan koersif, melainkan oleh saluran-saluran multilateral, transnasional, dan ekonomi yang saling mengikat. Bantuan luar negeri, dengan demikian, berfungsi sebagai instrumen yang membangun *positive interdependence* dimana negara donor memperoleh akses pasar dan diversifikasi ekonomi, sementara negara penerima memperoleh transfer kapasitas dan dukungan pembangunan, sehingga keduanya terikat dalam hubungan yang saling menguntungkan dan bukan bersifat *zero-sum game*.

Dalam konteks Indonesia di Kawasan Afrika, keempat mekanisme tersebut dapat ditelusuri secara empiris. **Mekanisme pertama (*door-opening policy*)** terlihat pada kasus Madagaskar, di mana hibah kemanusiaan senilai Rp 2,23 miliar pada Desember 2021 berkontribusi pada penghentian penyelidikan sengketa dagang produk sabun Indonesia pada Mei 2022, yang secara efektif membuka kembali akses

pasar bagi produsen Indonesia (IDNFinancials, 2022). **Mekanisme kedua (*trade-cost reduction*)** terwujud dalam bentuk bantuan teknis dan pelatihan yang meningkatkan kapasitas produksi negara penerima seperti hibah peralatan laboratorium pertanian ke Senegal dan pendirian pusat pelatihan FARTC di Tanzania sehingga menciptakan permintaan terhadap *input* produksi dan teknologi dari Indonesia (Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Mekanisme ketiga (*goodwill and long-term relationship*) terlihat pada kasus Nigeria, di mana bantuan 1,5 juta dosis vaksin Pentabio senilai Rp 30,3 miliar menghasilkan posisi strategis bagi PT Bio Farma sebagai pemasok kesehatan dengan HUB di kawasan Afrika (Kementerian Keuangan, 2023). **Mekanisme keempat (*FTA promotion*)** termanifestasi dalam pembentukan Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) yang diratifikasi melalui Perpres No. 90 Tahun 2021, yang secara langsung menurunkan hambatan perdagangan bilateral (FTA Center, 2022). Keempat mekanisme ini secara kumulatif menunjukkan bagaimana bantuan luar negeri Indonesia beroperasi bukan sebagai transfer satu arah, melainkan sebagai katalis bagi terbangunnya interdependensi ekonomi

yang positif antara Indonesia dan negara-negara penerima di Kawasan Afrika.

Pola di mana bantuan luar negeri berfungsi sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi negara donor ini sejatinya bukan fenomena baru. Khoiriati (1999) mencatat bahwa Jepang memberikan bantuan keuangan secara langsung ke negara-negara Asia selama krisis ekonomi regional, sehingga ekonomi negara-negara Asia menjadi stabil dan investasi dari perusahaan swasta Jepang di kawasan tersebut menjadi lancar. Bantuan yang dilakukan oleh Jepang justru semakin besar ketika krisis melanda Asia, karena Jepang menyadari bahwa stabilitas ekonomi negara-negara penerima berkorelasi langsung dengan kepentingan ekonomi domestiknya.

Pola serupa terlihat dalam strategi Indonesia yang tetap memberikan bantuan luar negeri ke Kawasan Afrika ketika banyak negara masih berjuang memulihkan ketahanan ekonominya akibat pandemi Covid-19. Dalam logika *positive interdependence* Keohane dan Nye (1977), keputusan Indonesia untuk tetap menyalurkan bantuan di tengah tekanan ekonomi global bukanlah tindakan irasional, melainkan investasi strategis untuk menjaga keberlanjutan akses pasar dan hubungan bilateral yang telah dibangun.

Sebagai *concentric circle* dalam diplomasi Indonesia, Kawasan Afrika merupakan kawasan yang paling dinamis dan menjadi orientasi Indonesia dalam menembus pasar non-tradisional. Untuk mewujudkan orientasi tersebut, Indonesia menggunakan strategi melalui pemberian bantuan luar negeri sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tiongkok, Brazil, dan India. Namun berbeda dengan pendekatan negara-negara tersebut, Indonesia mengadopsi prinsip kesetaraan dan *mutual benefit* yang menjadi ciri khas Kerja Sama Selatan-Selatan (IsDB & South Centre, 2019; Nauli, 2021).

Merujuk pada pendekatan liberalisme dan institusionalisme Keohane dan Nye (1977) serta mekanisme kausal Martínez-Zarzoso (2019), tujuan pemberian bantuan luar negeri Indonesia ke Kawasan Afrika lebih dimaksudkan pada tujuan ekonomi yang saling menguntungkan, di mana selain bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di negara penerima, juga ditujukan untuk perluasan industri dan pasar internasional Indonesia yang pada akhirnya mendukung ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kuantitas bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara di Kawasan Afrika, di mana setelah adanya bantuan tersebut hubungan perdagangan juga semakin erat.

Dari sisi kelembagaan, penyaluran dana bantuan Indonesia dikelola oleh LDKPI yang hingga saat ini telah mengelola *endowment fund* sebagai bentuk dari Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (DKPI) sebesar Rp 8 triliun. Pemberian bantuan luar negeri berupa hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing diambil dari imbal hasil *endowment fund* dari investasi rendah risiko yang telah dilaksanakan.

Dalam perspektif Keohane dan Nye (1977), keberadaan LDKPI sebagai institusi yang terstruktur dan kredibel merupakan prasyarat bagi terciptanya kerja sama yang berkelanjutan, karena institusi berfungsi mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan menyediakan kerangka aturan yang memungkinkan interaksi berulang antarnegara.

Di samping itu, untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari kebijakan pemberian bantuan luar negeri, Indonesia telah menggandeng pelaku usaha dalam negeri agar ikut dalam ekspansi pasar dan bisnis di Kawasan Afrika. Pelaku usaha dilibatkan dalam penyediaan komoditas hibah, yaitu berupa produk unggulan baik barang maupun jasa buatan dalam negeri Indonesia untuk menembus pasar internasional di Kawasan Afrika sehingga ekspor Indonesia meningkat (Pradika, 2023). Pelibatan aktor

non-negara ini sejalan dengan proposisi Keohane dan Nye (1977) bahwa dalam kondisi interdependensi kompleks, batas antara politik domestik dan internasional menjadi kabur, dan aktor-aktor transnasional menjadi saluran penting dalam membentuk hubungan antarnegara.

Secara empiris, dampak bantuan luar negeri terhadap penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Afrika dapat dilihat dari beberapa indikator. Sebagai salah satu kawasan prioritas dalam KSS Indonesia, Afrika telah menjadi target kawasan bagi pelaksanaan 94 program *capacity building* yang diselenggarakan Indonesia pada tahun 1999–2017, dengan sekitar 712 peserta yang berasal dari Benua Afrika di bidang pertanian, kesehatan, perikanan, dan ekonomi mikro (Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Lebih lanjut, terselenggaranya *Indonesia-Africa Forum* (IAF) pada 10–11 April 2018 telah berhasil meningkatkan penetrasi produk dan jasa Indonesia di pasar Afrika, menghasilkan kesepakatan bisnis sekitar US\$ 586,56 juta untuk kerja sama di bidang infrastruktur, industri strategis, dan skema pembiayaan. Dampaknya, terjadi peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Kawasan Afrika yang mencapai US\$ 11,04 miliar pada

2018, mengalami kenaikan sebesar 21,51% dari tahun sebelumnya. Selain itu, sekitar 30 perusahaan Indonesia telah melakukan investasi di Kawasan Afrika (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Data-data ini mengonfirmasi bahwa dalam kerangka *positive interdependence*, bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis yang menghasilkan imbal balik ekonomi nyata bagi ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

Kontribusi Ekspor Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia

Di tengah kondisi krisis global yang telah memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi global, Indonesia justru mampu memberikan bantuan luar negeri ke beberapa negara di Afrika. Bantuan tersebut juga telah berkontribusi dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara penerima bantuan. Bahkan nilai manfaat ekonomi juga diperoleh akibat pasar internasional di negara tersebut di buka untuk Indonesia.

Untuk mengukur kontribusi bantuan luar negeri terhadap ketahanan ekonomi nasional, bagian ini menganalisis data ekonomi makro Indonesia periode 2021–

2023 dengan mengaitkannya pada empat dimensi ketahanan ekonomi yaitu sebagai berikut.

Pada dimensi perdagangan, data BPS (2022) menunjukkan bahwa pada triwulan IV-2021, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 29,83% (*year-on-year*), menjadikannya kontributor tertinggi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02% (BPS, 2022). Secara spesifik, ekspor barang tumbuh 31,8%, dengan ekspor non-migas (besi, baja, bahan bakar mineral, peralatan listrik) tumbuh 34,0% (Bappenas, 2021). Meskipun data agregat ini tidak dapat secara langsung diatribusikan pada bantuan luar negeri ke Afrika, tren ini sejalan dengan strategi penetrasi pasar non-tradisional yang difasilitasi melalui bantuan dan kerja sama pembangunan. Volume perdagangan Indonesia-Afrika sendiri tercatat mencapai US\$ 11,04 miliar pada 2018, meningkat 21,51% dari tahun sebelumnya, pasca penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang menghasilkan kesepakatan bisnis senilai US\$ 586,56 juta (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, 2019).

Pada dimensi investasi, setidaknya 30 perusahaan Indonesia telah melakukan investasi di Kawasan Afrika (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, 2019), termasuk PT Bio Farma, PT Indorama, Indofood, Kalbe Farma, dan Sayap Mas Utama di

Nigeria, serta rencana proyek petrokimia senilai US\$ 2,5 miliar antara PT Pertamina dan Nigeria National Petroleum Corporation. Investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan langsung, tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) berupa permintaan terhadap barang modal dan jasa dari Indonesia.

Pada dimensi ketahanan terhadap guncangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% pada 2022 dan berlanjut pada 2023 (World Bank, 2023) menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan, di tengah perlambatan ekonomi global. Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional seperti Afrika yang difasilitasi oleh bantuan dan perjanjian perdagangan seperti IM-PTA berkontribusi pada pengurangan ketergantungan Indonesia pada pasar-pasar tradisional yang lebih rentan terhadap guncangan geopolitik dan ekonomi.

Pada dimensi kapasitas adaptif, pembentukan IM-PTA dengan Mozambik dan kerja sama teknis dengan Tanzania, Senegal, serta Nigeria menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengeksport barang, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi jangka panjang di Afrika. Mozambik, dengan pelabuhan Maputo, Nacala, dan Beira, berfungsi sebagai *gateway* bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar Afrika

bagian selatan dan tengah, termasuk negara-negara *landlocked* seperti Botswana, Zimbabwe, dan Zambia (Angriana, 2022).

Perlu diakui bahwa atribusi langsung antara bantuan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi makro memiliki keterbatasan metodologis, mengingat banyak variabel lain yang turut memengaruhi kinerja ekonomi nasional. Namun demikian, melalui analisis mekanisme kausal dan studi kasus yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa bantuan luar negeri berfungsi sebagai *enabling factor*, bukan satu-satunya penyebab, melainkan katalis yang memungkinkan terjadinya ekspansi ekonomi Indonesia di Kawasan Afrika.

Afrika dapat menjadi kawasan yang menjanjikan karena belum banyak negara yang memprioritaskan benua ini untuk ekspansi ekonomi. Tercatat hanya beberapa negara Eropa yang memiliki wilayah koloni di Afrika seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Portugal. Sementara Italia dan Belgia cenderung minim memberikan perhatian terhadap Afrika serta Jerman justru menghentikan kontribusi di Afrika atas kepentingan domestik (DW.com, 2022). Sebaliknya Tiongkok aktif melakukan kerja sama dan investasi cukup besar di Afrika. Hal ini disusul oleh Rusia dan Turki yang mencoba meningkatkan investasi ke

kawasan ini (Helmys, 2022; Paczyńska, 2020).

Memperhatikan berbagai realitas tersebut, Indonesia memiliki kepentingan untuk memperluas dan meningkatkan potensi pasar domestik ke Benua Afrika dengan pendekatan yang dilakukan melalui pemberian bantuan internasional. Terlebih, Indonesia memiliki berbagai komoditas andalan yang berkualitas yang dapat dijual ke Benua Afrika melalui perdagangan internasional, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, tekstil, furnitur, makanan minuman kemasan, elektronik, dan otomotif. Beragam industri komoditas domestik tersebut dapat semakin berkembang apabila didukung oleh permintaan yang besar. Afrika dengan jumlah penduduk yang besar menyimpan potensi yang besar yang dapat digunakan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

SIMPULAN

Indonesia memberikan bantuan luar negeri di Benua Afrika melalui KSST dan LDKPI sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan domestik dan luar negeri khususnya terkait motivasi ekonomi. Pemberian bantuan luar negeri ini cenderung sarat untuk meningkatkan akselerasi ekonomi dalam negeri. Bahwa faktor sejarah, hubungan kedekatan, dan solidaritas dalam kaitannya kerja sama

Selatan-Selatan saat ini digunakan kurang signifikan. Apalagi bantuan luar negeri ini dianggap rasional karena memiliki kepentingan dan keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak termasuk bagi ketahanan ekonomi negara pendonor.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa dalam kerangka liberalisme institusional Keohane dan Nye, bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika menciptakan kondisi *positive interdependence* yang saling menguntungkan. Melalui empat mekanisme kausal yang diidentifikasi Martínez-Zarzoso bantuan luar negeri Indonesia berfungsi sebagai katalis bagi perluasan akses pasar dan penguatan posisi ekonomi Indonesia di kawasan non-tradisional. Mekanisme tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia yang terukur melalui dimensi perdagangan, investasi, ketahanan terhadap guncangan, dan kapasitas adaptif.

Sebaliknya, adanya kebijakan reorientasi ke Benua Afrika bukan sekadar fondasi historis dan romantisme solidaritas, melainkan bentuk dari kepentingan ekonomi nasional jangka panjang bagi Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara donor baru memungkinkan adanya percepatan pembangunan berkelanjutan global yang mengisi ruang kosong yang

sebelumnya cenderung hanya diisi oleh negara dan lembaga donor tradisional dengan memberikan berbagai bentuk bantuan dalam bentuk investasi, kerja sama, pelatihan atau bentuk lainnya.

Indonesia bertransformasi dari yang awalnya merupakan penerima bantuan internasional menjadi negara donor yang mengakomodasi kepentingan nasional melalui pemberian bantuan luar negeri. Hal tersebut melibatkan mitra pembangunan maupun negara penerima secara setara untuk kepentingan bersama melalui hibah langsung, bantuan teknis, kemitraan pendidikan, serta bermacam aktivitas

lainnya yang mengikutsertakan aktor non-negara.

KSST dan LDKPI sebagai institusi yang bekerja dalam ruang lingkup politik, ekonomi, dan pendidikan secara paralel ditujukan untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonominya. Di sisi lain, Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional atas pemberian bantuan luar negerinya di kawasan Afrika.

REFERENSI

- Al-Husin, R.N. (2026). Latin America or Africa? Explaining Indonesia's Selective Trade Deepening. *IR-UI Commentaries*, Vol. VII, No. 3, February.
- Angriana, A. W. (2022). *Kerja Sama Perluasan Pasar Non Tradisional Indonesia-Mozambik Melalui Kerangka Perjanjian Preferential Trade Agreement (PTA)*. Universitas Hasanuddin.
- Astra Agro Lestari. (n.d.). Indonesia Mulai Menggarap Pasar Ekspor ke Mozambik. <https://www.astra-agro.co.id/id/2021/10/29/indonesia-mulai-menggarap-pasar-ekspor-ke-mozambik/>
- Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Edisi II*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2021). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia : Triwulan II tahun 2021. In *Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas* (Vol. 5, Issues 2, Agustus).
- BPPK Kemenlu. (2015). Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan Dan Triangular Bagi Kepentingan Nasional. In *Kajian Mandiri*.
- BPS. (2022). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y). In *Badan Pusat Statistik*.
- Direktorat Afrika, Kementerian luar negeri RI. (n.d). Gambaran Singkat Perkembangan Terkini Madagaskar dan Hubungan Bilateral RI – Madagaskar. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI. (2017, December). Menggandeng Benua Masa Depan. *Buletin Jendela, Edisi No. 6*.
- Dosch, J. &Triwibowo, A. (2025). Efektivitas Kerja Sama Pembangunan Internasional: Pencapaian Global dan Pengalaman Indonesia dalam Good Governance. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. XIV, No. 2, November.
- DW.com. (2022). *German investment in Africa stalls despite government push*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/german-investment-in-africa-stalls-despite-government-push/a-64033112>

- Fahrurrozi, M., Mohzana, Haritani, H., Yunitasari, D., & Basri, H. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) regional Kabupaten Lombok Timur dilihat dari Lombok Timur kurun waktu 2015-2019 menempatkan Kabup. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 70–89.
- Ferdiana, D., & Laksmi, A. C. (2018). Pengaruh Proses Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Serta Kepuasan Dan Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Pribadi Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 354. <https://doi.org/10.22146/jkn.38753>
- FTA Center. (2022). *IM-PTA*. Ftacenter.Kemendag.Go.Id. <https://ftacenter.kemendag.go.id/indonesia-mozambique-preferential-trade-agreement>
- Hamonangan, I. (2020). Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jkn.52695>
- Harahab, N., Fanani, Z., Puspitawati, D., & Said, A. (2020). Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kawasan Ekowisata Bahari Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 71–86. <https://doi.org/10.22146/jkn.53372>
- Helmys, N. & Irawan, Y. (2023). Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 8 No. 2, Jul-Des.
- Hermawan, Y. P., & Kasim, S. I. (2013). *Pemenuhan Komitmen Indonesia Untuk Overseas Development Aids (ODA) Dalam Kerangka Kerja Sama Global*. Kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Kementerian Keuangan RI.
- Hjertholm, P., & Tarp, F. (Eds.). (2000). *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future*. Routledge.
- Hutabarat, L. F. (2022). Indonesian Diplomacy of South-South Cooperation to Achieve Sustainable Development Goals 2030. *Sociae Polites*, 23(2), 139–152. <https://doi.org/10.33541/sp.v23i2.4446>

- IDNFinancials. (2022). *Indonesia ready to boost soap exports to Madagascar*. <https://www.idnfinancials.com/news/43335/indonesia-ready-boost-soap-exports-madagascar>
- IsDB. (2020). *ASSESSMENT FRAMEWORK FOR NATIONAL ECOSYSTEM FOR SOUTH – SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION NATIONAL*.
- IsDB, & South Centre. (2019). *Developing National Ecosystems for South-South and Triangular Cooperation to Achieve Agenda 2030 for Sustainable Development*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Siaran Pers: Dukungan Vaksinasi Indonesia untuk Masyarakat Nigeria*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dukungan-Vaksinasi-Indonesia>
- Khoiriati, S. D. (1999). Jepang dan Ketahanan Ekonomi Regional Asia Pascakrisis. *Jurnal Ketahanan Nasional*, IV(2), 53–71.
- Kimura, H. & Todo, Y. (2010). Is foreign aid a vanguard of foreign direct investment? A gravity-equation approach. *World Development*, 38(4), 482-497.
- Kompas.com. (n.d.). Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik . 2021. Retrieved May 24, 2023, from <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/13/20060331/indonesia-bantu-upaya-pemulihan-bencana-topan-di-zimbabwe-dan-mozambik>
- Kurniadi, T. (2020). Implementasi Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah/Lembaga Asing Sebagai Stimulus Soft Diplomacy. *Jurnal BPPK*, 13(1), 01–14. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440>
- KBRI ABUJA. (2024). Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. KBRI Abuja – Nigeria Merangkap Benin, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Niger, Sao Tome & Principe, Togo, dan Ecowas.
- Larasati, Langgeng dan Aseilla, Dike. (2021). Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia di Afrika Melalui Preferential Trade Agreement Indonesia Mozambik. *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2(2), 49–57.
- LDKPI. (2021). *Indonesia Memberikan Bantuan kepada Zimbabwe atas Bencana Topan Idai*. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

- <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/indonesia-memberikan-bantuan-kepada-zimbabwe-atas-bencana-topan-idai>
- LDKPI. (2022). *Pemerintah Indonesia Serahkan Hibah Peralatan Laboratorium Pertanian ke Pemerintah Senegal*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/pemerintah-indonesia-serahkan-hibah-peralatan-laboratorium-pertanian-ke-pemerintah-senegal>
- LDKPI. (2023). *Penerima Hibah*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/penerima-hibah>
- Martínez-Zarzoso, I. (2019). Effects of foreign aid on income through international trade. In *WIDER Working Paper* (Vol. 5, Issue February). <https://doi.org/10.17645/pag.v7i2.1830>
- Nauli, B. P. (2021). Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan: Diantara Solidaritas dan Kepentingan. *Syntax Idea*, 3(12), 2517–2531. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i12.1661>
- Oktavia, A. I. Y. (2023). *Analisis Perjanjian IM-PTA Indonesia dan Mozambik dalam Bidang Perdagangan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- PKSLN Kementan. (2015). *Buku Panduan Kerja Sama Bilateral Bidang Pertanian: Indonesia-Afrika Dan Timur Tengah*. Pusat Kerja Sama Luar Negeri-Kementerian Pertanian RI.
- Pradika, R. S. (2023). *Misi RI dalam Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230605133600-14-443038/misi-ri-dalam-pemberian-hibah-kepada-pemerintah-lembaga-asing>
- Pribadi, Y. (2021). Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(1), 71–81. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218>
- Pusat P2K-OI. (2016). Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia. In F. Cassidy (Ed.), *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P2K-OI) - BPPK - Kementerian Luar Negeri RI*. BPPK - Kementerian Luar Negeri RI.
- Secretariat of the Vice President. (2022). *Indonesia and Zimbabwe Expect Increased Cooperation in the Economic, Infrastructure, and Defense Sectors*.

- Ministry of State Secretariat.
<https://wapresri.go.id/ri-zimbabwe-harapkan-peningkatan-kerjasama-bidang-ekonomi-infrastruktur-hingga-pertahanan/>
- Siregar, R. R. (2016). Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina). *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1/ April), 50–59.
<https://doi.org/10.18196/hi.2016.0085.50-59>
- Sofjan, D., Kenngott, C., & Beloe, T. (2014). *South-South and Triangular Cooperation (SSTC): Stocktaking and Strategic Review*.
- Sustainable Economy Nigeria. (2023). FG, Indonesia sign agreement to establish coal fertiliser plant in Nigeria. Jadeite Africa Communication Limited.
<https://sustainableeconomyng.com/fg-indonesia-sign-agreement-to-establish-coal-fertiliser-plant-in-nigeria/>
- Sternehöll, T. (2018). *Donor Motives An Empirical Study of the Motives Behind Foreign Aid Allocation for Ten OECD Countries*. Södertörn University.
- The Observatory of Economic Complexity (OEC). (n.d.). Palm Oil in Senegal.
<https://oec.world/en/profile/bilateral-product/palm-oil/reporter/sen?selector1151id=2021>
- Thérien, J.-P. (2002). Debating foreign aid: Right versus left. *Third World Quarterly*, 23(3), 449–466.
<https://doi.org/10.1080/01436590220138385>
- Tim Kornas KSST. (2017). *Kajian Akademik: Pembentukan ‘Single Agency’ Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia*. Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan Selatan Triangular.
- World Integrated Trade Solution. (n.d.). Indonesia Product Export Product Share to Zimbabwe in % 2019-2022.
<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/StartYear/2019/EndYear/2022/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-PRDCT-SHR/Partner/ZWE/Product/all-groups>
- Wulandari, P. K. (2017). Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 300–319.
<https://doi.org/10.22146/jkn.28829>
- Yiew, T. H., & Lau, E. (2018). Does foreign aid contribute to or impeded economic growth? *Journal of International Studies*, 11(3), 21–30.

<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-3/2>

Zamzami, M. A. F. A., & Azizah, N. (2024).
Indonesia Strategy in Increasing

Economic Cooperation in African
Countries. *Jurnal Sosial
Humaniora*, 15(1), 13-22.